



ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS DI DINAS SOSIAL KOTA LUBUKLINGGAU)

Suri Herlina¹, Dheo Rimbano^{2*}, Sardiyo³

¹²³Program Studi Magister Manajemen, Universitas Bina Insan, Lubuklinggau

e-mail: *dheo_rimbano@univbinainsan.ac.id

*Corresponding Author

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai pada masa pandemi dalam meningkatkan kebijakan pemerintah dan untuk mengetahui pemberian Bantuan Langsung Tunai telah dilakukan dengan efektif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai, dimana terkait dengan kesejahteraan rakyat dan kemiskinan. Hasil dari penelitian ini diketahui kemiskinan struktural di Kota Lubuklinggau terjadi karena banyaknya infrastruktur jalan yang berada dalam kondisi rusak. Dari hasil analisis data dan fakta hasil penelitian telah mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa implementasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan pada Program Bantuan Langsung Tunai pada masa pandemi Kota Lubuklinggau dilihat dari segi penerima bantuan diketahui bahwa penerima bantuan telah sesuai dengan kriteria penerima bantuan.

Kata kunci: kebijakan; bantuan langsung tunai; covid-19

Abstract

This study aims to determine the evaluation of the Direct Cash Assistance policy during the pandemic in improving government policies and to find out that the provision of Direct Cash Assistance has been carried out effectively. This research was conducted at the Lubuklinggau City Social Service to evaluate the Direct Cash Assistance policy, which is related to people's welfare and poverty. The results of this study show that structural poverty in Lubuklinggau City occurs due to a large number of road infrastructures in damaged condition. From the results of the analysis of data and facts, the results of the research have led us to the conclusion that the implementation of poverty alleviation in the Direct Cash Assistance Program during the pandemic in Lubuklinggau City, seen from the perspective of beneficiaries, is known that the beneficiaries met the criteria for beneficiaries.

Keywords: rule; direct cash assistance; covid-19



I. PENDAHULUAN

Dunia saat ini tengah waspada dengan penyebaran sebuah virus yang dikenal dengan virus corona. Coronaviruses (CoV) merupakan bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Penyakit yang disebabkan virus corona, atau dikenal dengan Covid-19 (coronavirus disease 2019) adalah jenis penyakit baru yang ditemukan pada tahun 2019 dan belum pernah diidentifikasi menyerang manusia sebelumnya (Organization, 2019).

WHO (World Health Organization) memberikan pernyataan bahwa wabah COVID-19 sebagai pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Dikatakan pula kasus ini terjadi karena kasus yang dengan cepat meningkat tiga belas kali lipat di 114 negara dengan angka kematian tercatat berjumlah 4,291 orang. WHO mengatakan belum pernah terjadi pandemi virus corona pada saat yang sama dan belum ada pandemi yang dapat benar-benar terkendali. Atas dasar itu, maka WHO memberikan pernyataan tegas dan menghimbau Negara-negara untuk memberikan langkah cepat dan tepat guna mengatasi penyebaran COVID-19 ini (WHO, 2020).

Dengan cepat wabah pandemi COVID-19 yang awal munculnya di Wuhan, China pada Desember 2019, sampai Mei 2021 telah mencakup 222 negara termasuk Indonesia yang menempati urutan ke 18 kasus terbanyak (Organization, 2019). Tercatat hingga 25 Mei 2021 Indonesia memiliki 1.781.127 kasus terkonfirmasi positif di seluruh Indonesia. Dampak Covid 19 tersebut, mengakibatkan adPenelitian ini bertujuan untuk Pengaruh komitmen organisasi terhadap Kinerja pegawai pada Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dengan cepat wabah pandemi COVID-19 yang awal munculnya di Wuhan, China pada Desember 2019, sampai Mei 2021 telah mencakup 222 negara termasuk Indonesia yang menempati urutan ke 18 kasus terbanyak (Organization, 2019). Tercatat hingga 25 Mei 2021 Indonesia memiliki 1.781.127 kasus terkonfirmasi positif di seluruh Indonesia. Dampak Covid 19 tersebut, mengakibatkan adanya dampak pada berbagai segi termasuk dari segi perekonomian. Dampak pada perekonomian ini mengakibatkan perlunya bantuan terhadap bagi yang terkena dampak.

COVID-19 (coronavirus disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 adalah penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan manusia, dan dapat menyerang siapapun dalam segala jenis usia. Virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, Middle-East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) Dari 237 negara terdapat 224 negara ikut terinfeksi covid-19, 13 negara lainnya dinyatakan bersih terhadap kasus covid-19. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan keseluruhan wilayah sebesar 1,904,569 *km*² yang menjadikan Indonesia sebagai negara terluas di Asia Tenggara. Indonesia sendiri menjadi negara dengan jumlah kasus covid-19 tertinggi ke 18 di dunia dan jumlah kasus tertinggi pertama di Asia Tenggara dengan jumlah kasus sebanyak 1.314.634 kasus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai pada masa pandemi dalam meningkatkan kebijakan pemerintah dan untuk mengetahui pemberian Bantuan Langsung Tunai telah dilakukan dengan efektif.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau yang beralamat di Komplek Perkantoran Kota Lubuklinggau Kelurahan Watas Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan dari bulan Januari-Juni 2022.

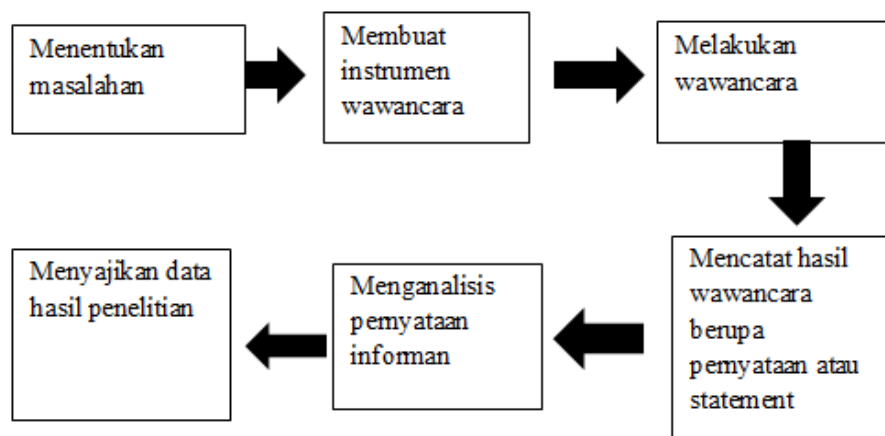
Rancangan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk

memberikan gambaran tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Kota Lubuklinggau.

Dasar Penelitian ini adalah pengamatan yang memfokuskan masalah pada program Bantuan Langsung Tunai mengenai pembagian beras sejahtera yang berkaitan dengan permintaan pemberian yang tepat tujuan dan sesuai dengan program yang diharapkan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu permasalahan dengan menggunakan kata-kata atau pernyataan yang diberikan oleh responden (Sugiyono, 2017). Rancangan atau desain penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Rancangan/Desain Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri dan dalam melakukan pengumpulan data terjadi interaksi antara peneliti data

dengan sumber data. Dalam interaksi ini baik peneliti maupun sumber data memiliki latar belakang, pandangan, keyakinan, nilai-nilai, kepentingan dan persepsi berbeda-beda, sehingga dalam

pengumpulan data analisis, dan pembuatan laporan terikat oleh nilai masing-masing (Sugiyono, 2017).

Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai, dimana terkait dengan kesejahteraan rakyat dan kemiskinan.

Kesejahteraan dapat diartikan persamaan hidup yang singkat dari kehidupan. Seseorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, ia terlepas dari kemiskinan serta bahaya yang mengancam (Taufiqurrahman, 2019).

Bantuan Sosial adalah konsumsi sebagai transfer uang tunai, produk atau administrasi yang disediakan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak layak untuk melindungi daerah dari kemungkinan bahaya sosial, memperluas batas keuangan dan bantuan tambahan pemerintah daerah. Ada beberapa jenis bantuan sosial yang diberikan otoritas publik ke daerah, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Rastra/ Bantuan Sosial/ Bantuan Pangan Non Tunai. (RI, 2018). Metode dalam pengambilan sampling menggunakan *porpositive sampling*, dimana yang menjadi subjek penelitian memiliki karakter yang sesuai dengan yang diinginkan dalam penelitian (Sugiyono, 2017).

Tabel 1. Informan Penelitian

Informan	Status / Jabatan Informan	Jumlah responden
Utama	Kepala Dinas Sosial	1
Pendukung	Camat	1
	Lurah	8
	Masyarakat miskin	16
Jumlah		26

Metode dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme (Sugiyono, 2017). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Metode penelitian ini sering digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah yakni obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.

Data dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam mendukung penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang peneliti peroleh melalui teknik pengumpulan data yaitu :



1. Data primer

Data yang diperoleh dari hasil :

- a. Teknik interview atau wawancara yaitu melakukan wawancara baik secara mendalam maupun secara bebas kepada subjek penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan serta dibantu dengan recorder.
- b. Teknik Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung untuk mengumpulkan data tentang pembangunan yang terjadi.

2. Data sekunder

Data diperoleh melalui studi pustaka (Library Search) yaitu mengambil data dari sejumlah buku, literatur, internet, maupun perundang-undangan.

Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2015) bahwa metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Cara menunjuk pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi hanya dapat dipertontonkan penggunaannya.

Menurut Sugiyono (2017) bahwa langkah yang harus ditempuh dalam pengumpulan data adalah mencari informasi dari kepustakaan (buku, koran, majalah, brosur) mengenai hal-hal yang ada relevansinya dengan judul garapan.

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dan dapat dipertanggung jawabkan maka peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan

kekurangan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Wawancara/interview, beberapa survei melalui pertanyaan tertulis dan tes, kriteria dan dokumentasi, yaitu melakukan penelusuran terhadap berbagai dokumen yang sudah ada, seperti Program Bantuan Langsung Tunai Kota Lubuklinggau serta hasil penelitian yang sudah ada.

Prosedur Analisis Data

Menurut Arikunto (2015) bahwa tindakan lanjutan kegiatan penelitian sesudah pengumpulan data sangat bervariasi bentuknya tergantung dari bagian data yang terkumpul akan diorganisasikan (Arikunto, 2015).

Data yang terkumpul akan dianalisa secara Deskriptif dengan pendekatan kualitatif sesuai jumlah variabel yang dijadikan indikator dalam penelitian ini dan didukung dengan data sekunder.

Menurut Miles & Huberman bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2019). Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pertama, Reduksi data yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh, kemudian ditentukan data yang sesuai dengan penelitian ini dengan pengklasifikasian yang ada. Sementara data yang kurang relevan dikesampingkan. Data-data yang sesuai tersebut berkaitan dengan masalah utama yang teridentifikasi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada



penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kedudukan Dinas Sosial Kota Lubuklinggau adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dibidang Kesejahteraan Sosial Kota Lubuklinggau yang pada saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang (Kabid), 15 Kepala Seksi (Kasi) dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil 59 orang yang dilatar belakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan sehari-hari 66 hari berada dibawah tanggung jawab Wali Kota melalui Sekretaris Kota Lubuklinggau.

Kedudukan Dinas Sosial Kota Lubuklinggau sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana kabupaten/kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintah

maupun dalam pengelolaan pembangunan. Kewenangan yang luas ini disatu sisi dapat dipandang sebagai kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan baru dan cukup berat dan menantang.

Gambaran Umum Kemiskinan di Kota Lubuklinggau

Berdasarkan hasil wawancara surveyor dengan Kota Lubuklinggau. Kondisi jalan ini akan bertambah parah bila musim hujan tiba, seperti saat sekarang. Kerusakan jalan penghubung antar keHumas Dinas Sosial ini menyebabkan arus barang dan informasi menjadi terganggu. Akibatnya penduduk keHumas Dinas Sosial harus menanggung biaya transportasi yang tinggi ketika memasarkan hasil panen mereka. Tingginya biaya transportasi ini juga menyebabkan mahalnya harga barang kebutuhan pokok yang berasal dari luar ke Humas Dinas Sosial.

Mayoritas penduduk ke Humas Dinas Sosial adalah petani terkadang hanya mengandalkan hanya dari hasil pekerjaan utama semata seperti bertani padi dengan mengandalkan hasil tadah hujan. Terkadang pertanian dengan mengandalkan hasil tadah hujan tidak pasti dimana terkadang faktor cuaca menjadi penyebab gagal panen yang dialami oleh petani padi darat. Ketergantungan petani yang hanya mengandalkan curah hujan semata sehingga menjadi faktor penyebab terjadinya pemacu kemiskinan yang ada.

Kebanyakan petani sawah darat menggantungkan pendapatannya hanya dengan bertani saja tanpa ada usaha lain, dengan kata lain bahwa pendapatan yang diperoleh petani tidak menentu, apabila curah hujan normal maka petani memperoleh penghasilan yang maksimal, akan tetapi jika curah hujan tidak menentu maka penghasilan petani memperoleh penghasilan yang kurang.

Kemiskinan struktural di Kota Lubuklinggau terjadi karena banyaknya infrastruktur jalan yang berada dalam kondisi rusak. Menurut keterangan Humas Dinas Sosial Muara Kelingi, usulan perbaikan infrastruktur jalan telah



disampaikan ke pemerintah kabupaten, namun hingga saat ini belum ada perbaikan yang dilakukan.

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai

Program BLT Desa yang diluncurkan oleh pemerintah, diharapkan bisa mendukung program jaring pengaman sosial pemerintah lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako maupun Kartu Pra Kerja dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Pemberian BLT Desa kepada masyarakat harus memenuhi kriteria keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan serta tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan program bantuan sosial pemerintah lainnya seperti yang termuat dalam Pasal 39 PMK Nomor 222/PMK.07/2020.

Kebijakan Bantuan Tunai Langsung Masa Pandemi

Dalam rangka mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Republik Indonesia pada Tahun 2022 ini Kembali menyalurkan program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa. BLT Dana Masyarakat yang diperuntukkan bagi masyarakat masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu antara lain keluarga miskin, keluarga yang ada warga sakit kronis/menahun, tidak memiliki pekerjaan dan seluruhnya belum mendapat bantuan sosial lain. Adapun besaran BLT tahun ini sama seperti tahun lalu sebesar Rp300.00,- per bulan per KPM, dan diberikan setiap bulan selama setahun (12 bulan). Dana Masyarakat juga digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan dan hewani serta penanganan

peningkatan kesehatan masyarakat, termasuk penurunan stunting dan penanganan Covid-19 di desa. Selain itu,

Dana Masyarakat dimanfaatkan untuk program pembangunan infrastruktur masyarakat dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal, dan program pengembangan masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik desa. Sehingga, pemanfaatan Dana Masyarakat diharapkan bisa seimbang antara penanganan Covid-19 dan pembangunan infrastruktur di desa. Pemda Kota Lubuklinggau di Tahun 2022 ini mendapatkan alokasi Dana Masyarakat sebesar Rp. 238.130.726.000,-. Alokasi Dana Masyarakat ini mengalami kenaikan sebesar Rp.10.811.106.000,- (naik 4,75%) dari tahun sebelumnya (2021) sebesar Rp.227.319.620.000,-.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil analisis data dan fakta hasil penelitian telah mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa :

1. Implementasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan pada Program Bantuan Langsung Tunai pada masa pandemi Kota Lubuklinggau dilihat dari segi penerima bantuan diketahui bahwa penerima bantuan telah sesuai dengan kriteria penerima bantuan, kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai pada masa pandemi dilakukan dengan mempertimbang bagaimana keadaan penerima bantuan.
2. Kendala dalam implementasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan pada Program Bantuan Langsung Tunai pada masa pandemi Kota Lubuklinggau dilihat dari Program Bantuan Langsung Tunai pada masa pandemi yaitu terkadang waktu



pembagian tidak selamanya tepat waktu.

V. SARAN

Program Bantuan Langsung Tunai pada masa pandemi dalam pelaksanaannya tentunya banyak menghadapi tantangan dan hambatan- hambatan yang perlu dibenahi untuk pelaksanaan program selanjutnya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2015). *Prosedur Penelitian Edisi Revisi* (R. Cipta (ed.); 10th ed.). Jakarta.
- Arikunto, S. (2017). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Rineka Cipta. Arsyad. *Aspek Sikap Mental dalam Manajemen SDM*. Ghalia Indonesia.
- Edward R. Tupe. (2018). *Kebijakan Publik*. Salemba Empat.
- Franklin, R. &. (2016). *Kebijakan Publik*. Rineka Cipta. Goggin. (2019). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*. Rosdakarya.
- Grindle. (2018). *Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Hafni, R. (2021). Analisis Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Ketahanan Pangan di Era Pandemi (studi kasus Desa Simpang Empat , Kec . Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan, 2(1), 1185–1198.
- Hidayat, S. (2019). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kerjasama Tim Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Pada Pt. Dunia Barusa Banda Aceh. *Jurnal Manajemen*, 5(1), 84–98. <https://doi.org/10.24815/jped.v5i1.14088>
- Jabar, S. A. dan C. S. A. (2019). Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa Praktisi Pendidikan.
- Refika Aditama. Kartasasmita. (2017). *Ekonomi Pembangunan*. Rineka Cipta.
- Kartasasmita, G. (2016). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Pustaka Cakra.
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (R. Cipta (ed.)). Jakarta.
- Keban. (2017). *Kebijakan Publik*. Rineka Cipta.
- Lubis, A. I. (2017). *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial*. Pustaka Cakra.
- Mahmudi. (2015). *Pengembangan Sumber Daya Manusia* (R. Cipta (ed.)). Jakarta.
- Mulyasa, E. (2019). *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bumi Aksara. Nasional,
- D. P. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (B. Pustaka (ed.)). Jakarta.
- Organization, W. H. (2019). *Coronavirus Disease 2019*. Quade. (2019). *Implementasi Kebijakan*. Rineka Cipta.
- Sabatier, M. dan. (2017). *Kebijakan Publik*. Grafindo Persada